

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
(MTs ISLAMIYAH YPI BATANGKUIS KAB. DELI SERDANG)
Muhammad Rizki Syahputra¹, Eka Daryanto², Irsan Rangkuti³
muhammadrizkisyahputra08@gmail.com**

Abstrak: Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana saja, tetapi juga menyangkut penggunaan dana secara efektif dan efisien. biaya pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru. Pembiayaan pendidikan memiliki sifat yang lebih kompleks daripada hanya menghitung biaya pada suatu unit produksi barang atau jasa. Penelitian ini dilakukan di MTs Islamiyah YPI Batangkuis Jl. Mesjid Jamik Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan untuk memaparkan perhitungan biaya satuan per siswa per program keahlian.

Kata Kunci: Biaya Operasional dan Biaya Investasi

Abstract: Education funding is not only about analyzing sources of funds, but also regarding the use of funds effectively and efficiently. tuition fees include direct costs and indirect costs. Direct costs consist of costs incurred by the government, the community, and parents of students for the purposes of implementing teaching and student learning activities in the form of purchasing learning tools, learning facilities, transportation costs, teacher salaries. Education financing has a more complex nature than just calculating the cost of a unit of production of goods or services. This research was conducted at MTs Islamiyah YPI Batangkuis Jl. Jamik Mosque Bintang Meriah Village Batang Kuis Subdistrict, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. The time of the study was conducted in May 2018. This study used a qualitative approach and used descriptive analysis methods. Descriptive analysis method is carried out to describe the calculation of unit costs per student per expertise program.

Keywords: Operational Costs and Investment Costs

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi "pertanyaan besar" bagi kalangan pemerhati pendidikan mengingat masih rendahnya mutu pendidikan kita dibanding dengan negara-negara

berkembang lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Demikian pula tingkat pemerataan mutu pendidikan sekolah dan madrasah secara nasional masih memperUhatkan perbedaannya yangcukup tajam, antara sekolah di kota besar dengan sekolah yang berada

di pedesaan. Ditambah lagi fakta sosial menunjukkan masih rendahnya tingkat kemampuan ekonomi masyarakat untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu bagi anaknya, sehingga hal ini mengesankan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pendidikan belum memihak kepada rakyat.

Munurut Sumardi, pada akhir dasawarsa ini, pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. *Pertama*, sebagai akibat krisis ekonomi, pendidikan nasional dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua* untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan nasional dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Pada saat yang bersamaan pula, dunia pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yaitu: a) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; b) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan c) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis. Dengan demikian kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan.

Berbicara tentang mutu pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah/madrasah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah/madrasah) tidak berjalan. Biaya (*cost* dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis penyelenggaraan yang berkenaan dengan semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang dan tenaga yang dapat diuangkan). Dalam pengertian ini misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi semua sarana fisik, baik sekolah maupun guru juga adalah biaya.

Pemenuhan dana pendidikan sebesar 20% sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen merupakan cerminan keinginan segenap bangsa Indonesia untuk memiliki pendidikan yang lebih merata dan berkualitas/bermutu. Pencapaian pendidikan nasional yang lebih merata dan bermutu ini lebih jauh dinyatakan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pasal 3 dan 4: Pasal 3: "Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”.

Pasal 4: “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Undang-undang 1945 dan PP No. 19 /2005 tersebut memberikan isyarat bahwa pemenuhan anggaran pendidikan yang memadai harus diorientasikan pada perwujudan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Permasalahan pemenuhan anggaran 20% ini telah menjadi polemik yang cukup besar, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Diantaranya karena alasan ketidakmampuan Negara untuk membiayai pendidikan dengan porsi 20% sekaligus dari APBN. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kenaikan prosentase anggaran pendidikan secara berkala, sehingga akhirnya dapat mencapai 20%. Dimulai pada tahun 2004 dengan persentase 6,6 persen, ditingkatkan menjadi 9,3 persen pada tahun 2005, bertambah menjadi 12 persen pada tahun 2006, meningkat hingga 14,7 persen pada tahun 2007, 17,4 persen pada tahun 2008, serta mencapai 21,1 persen pada tahun 2009.

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah I dan II (propinsi dan kab./kota). Kondisi ini sebagaimana ditegaskan dalam PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Implementasi

perundang-undangan yang dimaksud memerlukan tekad yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada tataran daerah tingkat I dan daerah tingkat II (propinsi dan kabupaten/kota) tuntutan akan hal yang sama terus bergulir dari berbagai pihak, seperti organisasi profesi pendidikan, pemerhati pendidikan, peneliti pendidikan, dan berbagai kalangan lainnya. Semuanya mendukung untuk mengalokasikan 20% untuk pendanaan pendidikan. Desakan ini semakin marak, manakala unit satuan pendidikan dasar tidak diperbolehkan untuk memungut dana dari masyarakat untuk penyelenggaraan sekolah, sebagaimana ditegaskan dalam PP 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Kehadiran PP 47 dan PP 48 tahun 2008 ini telah memunculkan asumsi masyarakat umum “bahwa pendidikan dasar (SD dan SMP) harus gratis. Gratis dalam arti tidak ada pungutan apapun kepada siswa, manakala anak-anak mereka masuk dan menjadi peserta didik di sekolah. Bahkan asumsi masyarakat berkembang lebih dari itu, “tidak hanya SD dan SMP yang harus gratis, tetapi juga SMA dan SMK.” Tentu saja kondisi ini mengubah banyak hal (program, kegiatan, kebiasaan) di sekolah.

Mengapa pendidikan memerlukan begitu banyak dana? Sebagaimana dijelaskan dalam PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dana pendidikan dibagi kepada biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Yang menjadi urusan pemerintah, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya

investasi. Biaya operasional adalah biaya personalia dan non personalia. Biaya personalia pendidikan terdiri dari biaya personalia unit satuan pendidikan dan biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan. Biaya personalia satuan pendidikan terdiri dari:

1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

Sedangkan biaya personalia penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan adalah: gaji pokok; tunjangan yang melekat pada gaji; tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Biaya investasi adalah biaya investasi lahan pendidikan dan investasi selain lahan pendidikan. Banyaknya komponen yang harus dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan dana

Sedangkan biaya personalia penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan adalah: gaji pokok; tunjangan yang melekat pada

gaji; tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Biaya investasi adalah biaya investasi lahan pendidikan dan investasi selain lahan pendidikan. Banyaknya komponen yang harus dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan dana dari satu sumber, seperti dari pemerintah pusat saja, atau pemerintah daerah seperti kabupaten/kota saja, tetapi harus diakomodasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Namun berapa proporsi untuk masing-masing dalam pembiayaan pendidikan ini? Apakah pemerintah pusat 50%, pemerintah propinsi 30%, dan pemerintah Kab./Kota 20%? Atau ada formula lain untuk mengalokasikan pembiayaan pendidikan ini. Apakah ada peraturan penundang-undangan yang mengatur akan hal tersebut? Lalu bagaimana implementasi pembagian kewenangan untuk membiayai pendidikan ini?

Berbagai pertanyaan tersebut masih banyak menyisakan ketidakjelasan mengenai porsi anggaran dari masing-masing pihak dalam membiayai pendidikan. Sehingga pada akhirnya, tidak jarang pemerintah propinsi dan pemerintah kab./kota mengalami kebingungan dalam merencanakan berbagai program dan kegiatan dalam membangun pendidikan di daerah, khususnya jika dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Kondisi ini terus berlarut sehingga mengakibatkan tidak jelasnya keadilan yang diterima oleh kab./kota dalam hal pembiayaan pendidikan. Dampak dari hal ini adalah timpangnya pembangunan pendidikan antara satu kab./kota dengan kab./kota lainnya di Jawa Barat. Dalam konteks tersebut,

keadilan dalam pembiayaan pendidikan menjadi angan-angan belaka. Untuk itu diperlukan suatu kajian secara khusus yang dapat menggambarkan berapa seharusnya pemerintah propinsi dan kab./kota di Jawa Barat mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan, baik untuk aspek biaya investasi maupun operasional.

B. Batasan Masalah

Permasalahan pembiayaan pendidikan meliputi banyak tema dan wilayah kajian. Secara konseptual, pembiayaan pendidikan dapat dianalisis dari sisi kebijakan dan perundang-undangan pendidikan, jenis-jenis pembiayaan pendidikan, *unit cost* (satuan biaya), *rate of return* (ror) pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya. Penelitian ini secara khusus membatasi masalah penelitian secara konseptual pada identifikasi jenis-jenis pengeluaran biaya pendidikan. Pengeluaran pendidikan diidentifikasi melalui dua jenis, yaitu biaya operasional dan biaya investasi.

Secara kontekstual, pembiayaan pendidikan dapat diteliti dalam berbagai bentuk pendidikan. Pendidikan terdiri dari jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan persekolahan, pendidikan non formal adalah pendidikan non persekolahan dan pendidikan informal adalah pendidikan di keluarga dan masyarakat. Penelitian ini akan mengkhususkan pada pendidikan formal. Pendidikan formal terdiri dari jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan dapat diidentifikasi sebagai pendidikan umum, kejuruan, akademik,

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Secara kontekstual, penelitian ini akan mengkhususkan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan MTs.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah “bagaimana pembagian dana pendidikan dasar dan menengah?” Secara rinci, rumusan masalah penelitian adalah, Bagaimana biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal untuk sekolah?

D. Luaran Penelitian

Penelitian ini menghasilkan Naskah mengenai Kebutuhan nyata pembiayaan pendidikan di sekolah, baik kategori biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya operasional.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Pembiayaan pendidikan sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan pendidikan tidak berdiri sendiri tetapi selalu dikaitkan dengan kegiatan produksi pokok atau *core business*. Dalam penyelenggaraan sekolah, produksi utama sekolah adalah kegiatan belajar mengajar. Artinya bagus atau tidaknya pembiayaan pendidikan harus dilihat pada sejauhmana biaya yang ada dapat mendukung terjadinya layanan KBM yang efektif. Tentu saja KBM ini tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh berbagai factor atau komponen, seperti karakteristik siswa itu sendiri, guru, dan fasilitas pembelajaran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana saja, tetapi juga

menyangkut penggunaan dana secara efektif dan efisien. Fattah (2009: 23) menjelaskan biaya pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru. Pembiayaan pendidikan memiliki sifat yang lebih kompleks daripada hanya menghitung biaya pada suatu unit produksi barang atau jasa. Meskipun pengelompokkan komponen pembiayaan sama, yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung, namun yang membedakan dalam konsep pembiayaan pendidikan adalah diperhitungkannya sebagai pendapatan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Cohn, 1979).

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (out put) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (unit cost) per siswa. Menurut Coombs dan Hallak (1978), biaya satuan per siswa per tahun dihitung dengan membagi total pengeluaran per tahun akademik dengan jumlah murid yang terdaftar dalam kategori pendidikan tertentu.

Sedangkan Muljani A. Nurhadi (2011) biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya (inputs) atau seluruh pengeluaran dalam bentuk natura atau berupa uang

yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Mulyono (2010:78) bahwa pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (revenue) dan penggunaan biaya yang diperuntukan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan biaya pendidikan merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Fattah (2000) menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya: uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis, dan lain-lain).

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran

penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Masih dalam buku yang sama menurut Nanang Fattah, (2006:23) Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu.

Munurut Sumardi (2005:51), pada akhir dasawarsa ini, pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. *Pertama*, sebagai akibat krisis ekonomi, pendidikan nasional dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan nasional dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari upaya

untuk mendanai berbagai komponen kebutuhan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Mulyasa (2004:47) berpendapat bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Supriadi (2006: 3) menyatakan bahwa biaya (*cost*) memiliki pengertian yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargaikan dengan uang). Dengan pengertian ini, misalnya iuran siswa merupakan biaya pendidikan, demikian pula dengan sarana fisik, buku sekolah dan guru juga merupakan biaya. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan pendidikan (*educational finance*).

B. Kategori Biaya Pendidikan

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro dikenal beberapa kategori biaya pendidikan

(Anwar, 1991; Gaffar, 1991; Thomas, 1992). Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

Kedua, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*).

Dalam kenyataannya, ketiga kategori biaya pendidikan tersebut dapat “bertumpang tindih”, misalnya ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat langsung dan tidak langsung serta berupa uang dan bukan uang, dan ada juga biaya langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan sosial yang dalam bentuk uang maupun bukan uang.

Di samping itu, dikenal juga anggaran belanja pendidikan (*educational budget*) yang terdiri atas dua komponen, yaitu: (1) pendapatan, pemasukan atau penerimaan; dan (2)

pengeluaran atau belanja. Bila dibedakan berdasarkan sifatnya maka dikenal biaya rutin (*routine/recurrent budget*) dan biaya investasi atau pembangunan (*investment/development budget*). Menurut Mulyasa (2004: 48), biaya rutin adalah biaya yang langsung dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non-guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

Dalam sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya rutin kepada lembaga-lembaga atau satuan-satuan penyelenggara pendidikan dituangkan dalam DIK (Daftar Isian Kegiatan), sedangkan biaya pembangunan dialokasikan dalam DIP (Daftar Isian Proyek). Di samping itu dikenal pula DIKS (Daftar Isian Kegiatan Suplemen), yaitu alokasi anggaran yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Penyaluran subsidi pemerintah ke satuan pendidikan (sekolah) dapat berupa uang yang telah jelas peruntukannya (*earmarked allocation*), dana tambahan berbentuk hibah (*block grant*), atau berupa tenaga dan barang (*in-kind allocation*) seperti guru/tenaga kependidikan, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah (Caldwell, Levacic dan Ross, 1999).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs Islamiyah YPI Batangkuis Jl. Mesjid Jamik Desa Bintang Meriah Kecamatan

Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan untuk memaparkan perhitungan biaya satuan per siswa per program keahlian.

C. Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, *Person* sumber data yang bisa memberikan data berupa jawabanlisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket, Adapunsumber data yang berupa *person* dalam penelitian ini yakni Kepala Sekolah,

Kasubag Tata Usaha dan Bendahara Sekolah, *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,angka, gambar, atau simbol-simbol lain.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat sekolah di MTs Islamiyah YPI Batangkuis yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa. Dalam penelitian kualitatif menggunakan *non-probabilitas sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun sampel dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, bendahara sekolah, kasubag Tata Usaha,

HASIL PENELITIAN

Biaya Operasional

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	a. Insentif tambahan bagi guru PNS/GTY dari Pemda Kab./Kota per orang per bulan		√	
	b. Insentif tambahan bagi tenaga administrasi di sekolah dari Pemda Kab./Kota per orang per bulan		√	
	c. Honor bagi guru untuk kelebihan jam mengajar	√		

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
	dari sekolah			
	d. Honor yang diterima guru bantu/sukwan/honor daerah dari sekolah per bulan		√	
	e. Biaya perjalanan dari sekolah untuk proses mutasi/promosi per guru		√	
	f. Hadiah hari raya dari sekolah untuk guru (per orang)	√		
	g. Hadiah hari raya dari sekolah untuk tenaga administrasi	√		150.000
	h. Biaya yang dialokasikan dari sekolah untuk pakaian seragam guru per orang	√		150.000
	i. Biaya yang dialokasikan dari sekolah untuk pakaian seragam tenaga administrasi per orang	√		200.000
	j. Alokasi uang lembur dari sekolah bagi tenaga administrasi sekolah per jam	√		35.000
Peningkatan Profesi/Diklat	a. Biaya khusus sekolah untuk diklat peningkatan kemampuan professional bagi guru per orang	√		

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
	per tahun			
	b. Biaya diklat bagi kepala sekolah per orang per tahun	√		
	c. Biaya diklat bagi tenaga administrasi sekolah per orang per tahun	√		
	d. Biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan KKG/MGMP per guru per tahun	√		
	e. Biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan MKKS per tahun	√		
Penyelenggaraan KBM	a. Biaya sekolah untuk penyediaan buku bahan ajar per siswa per tahun		√	
	b. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktikum IPA per siswa pertahun	√		
	c. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik IPS persiswa pertahun	√		
	d. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik keterampilan persiswa per tahun	√		
	e. Biaya sekolah untuk	√		

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		AD A	TIDA K	
	pengembangan kurikulum muatan lokal dan pengembangan diri (satu kali per tahun)			
	f. Biaya sekolah untuk pelaksanaan remedial persiswa pertahun		√	
	g. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktikum IPA per siswa pertahun		√	
	h. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik IPS persiswa pertahun		√	
	i. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik keterampilan persiswa per tahun		√	
	j. Pebelian peralatan praktikum	√		
	k. Pembelian buku pelajaran		√	
	l. Pembelian alat tulis kantor	√		
Penilaian	a. Biaya sekolah untuk ulangan umum (teori) persiswa pertahun			
	b. Biaya sekolah untuk ulangan umum praktek persiswa		√	

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
	pertahun			
	c. Biaya sekolah untuk ujian akhir tertulis		√	
	d. Biaya sekolah untuk ujian akhir praktik		√	
	e. Biaya sekolah untuk pengembangan dan penilaian tes diagnostik untuk siswa baru per siswa per tahun		√	
	f. Biaya sekolah untuk pengukuran IQ, EQ per siswa per tahun	√		
	g. Biaya khusus untuk pembelian buku raport per siswa			
Pemeliharaan dan penggantian	a. Biaya sekolah untuk perawatan bangunan sekolah per tahun	√		
	b. Biaya sekolah untuk perawatan perabot kantor per tahun	√		
	c. Biaya sekolah untuk penggantian alat IPA per tahun	√		
	d. Biaya sekolah untuk penggantian alat keterampilan yg rusak per tahun	√		
	e. Biaya sekolah untuk penggantian buku pelajaran yg	√		

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
	rusak pertahun			
	f. Pembangunan tempat ibadah	√		
	g. Pembangunan ruang ekstrakurikuler	√		
	h. Pembangunan fasilitas olahraga	√		
	i. Pembangunan ruang perpustakaan	√		
	j. Pembangunan gedung atau ruang praktikum	√		
Kesiswaan	a. Biaya sekolah untuk pembinaan pramuka tingkat sekolah	√		300.000
	b. Biaya sekolah untuk pembinaan olahraga tingkat sekolah	√		300.000
	c. Biaya sekolah untuk pembinaan kesenian tingkat sekolah	√		
	d. Biaya sekolah untuk pelaksanaan Porseni tingkat sekolah	√		
	e. Biaya sekolah untuk pelaksanaan Cerdas Cermat tingkat sekolah	√		
	f. Biaya sekolah untuk pelaksanaan Olimpiade sains tingkat sekolah	√		
	g. Biaya pembinaan KIR per tahun	√		
	h. Biaya untuk	√		

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
	penyelenggaraan Peringatan hari raya besar per tahun			
	i. Biaya sekolah untuk kegiatan Pesantren kilat per siswa	√		50.000
	j. Biaya sekolah untuk kegiatan orientasi siswa baru	√		250.000
	k. Beasiswa dari Depdiknas per siswa per tahun (BOS Pusat)	√		
	l. Beasiswa dari pemda Propinsi per siswa per tahun (BOS propinsi)	√		
	m. Beasiswa dari pemda Kab./Kota per siswa per tahun (BOS pendamping)	√		

A. Biaya Investasi

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
Sarana Prasarana	1. Biaya untuk pembebasan tanah untuk lahan	√		

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN sekolah	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
	2. Bangunan	√		
	a. Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru	√		150.000.000
	b. Biaya untuk pembangunan ruang Tata Usaha	√		50.000.000
	c. Biaya untuk pembangunan ruang Kepala Sekolah	√		50.000.000
	d. Biaya untuk pembangunan ruang Wakil KS	√		
	e. Biaya untuk pembangunan ruang Guru	√		
	f. Baiaya untuk pembangunan ruang Perpustakaan	√		
	g. Biaya untuk pembangunan Laboratorium IPA		√	
	h. Biaya untuk pembangunan Laboratorium Bahasa		√	
	i. Biaya untuk pembangunan ruang Keterampilan	√		
	j. Biaya untuk pembangunan lapang Olahraga	√		
	k. Biaya untuk pembangunan ruang Serbaguna	√		
	l. Biaya untuk pembangunan ruang Ibadah	√		100.000.000
	m. Biaya untuk pembangunan kamar kecil /WC	√		50.000.000
	n. Biaya untuk pembanguan ruang		√	

Jenis Pembiayaan Pendidikan	ASPEK PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN SEKOLAH		Jika ada, besaran nominalnya (Rp)
		ADA	TIDAK	
	Ekstrakurikuler			
	o. Biaya untuk pembangunan ruang BK		√	
	3. Buku			
	a. Biaya untuk pembelian buku Teks Utama per tahun	√		
	b. Biaya untuk pembelian buku Perpustakaan per tahun	√		
	c. Biaya untuk pembelian buku Sumber per tahun	√		
	d. Biaya untuk pembelian buku Pelengkap per tahun	√		
	4. Alat			
	a. Biaya untuk pembelian Alat peraga per tahun		√	
Komponen Pembiayaan	b. Biaya untuk pembelian Alat Praktik per tahun		√	
	c. Biaya untuk pembelian LCD per tahun		√	
	d. Biaya untuk pembelian Komputer per tahun		√	
	e. Biaya untuk pembelian Perabot per tahun	√		
Tenaga	a. Biaya untuk pengadaan tenaga pendidik per orang		√	
	b. Biaya untuk pengadaan tenaga kependidikan per orang		√	

